

EDUCATION RECOVERY

Drs. Faisal HM, M.Pd.I

Abstrak:

Dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini menghadapi cobaan dari masyarakat. Masyarakat dihadapkan pada sistem pendidikan yang berubah-ubah dalam kurun waktu yang singkat, sehingga membingungkan masyarakat. Usaha perbaikan itu telah ditunjukkan oleh Mendiknas dengan turun kelapangan guna mencari data tentang problem pendidikan di Indonesia. Tanggal 24 April 2007, Menteri Pendidikan Nasional terbang ke Bandung, 26 April 2007 ke Nusa Tenggara Timur, dilanjutkan ke Bali, Goron Talo dan Sulawesi. (data Majalah Sahabat Pena terbitan Bulan Mei 2006).

Keywords: Pendidikan, Recovery

A. Pendahuluan

Di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang, pendidikan merupakan kajian yang tidak pernah berhenti. Itu disebabkan karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk mentransfer ilmu pengetahuan.

Dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini menghadapi cobaan dari masyarakat. Masyarakat dihadapkan pada sistem pendidikan yang berubah-ubah dalam kurun waktu yang singkat, sehingga membingungkan masyarakat. Contoh penamaan terhadap pendidikan menengah umum pertama Sekolah Lanjutan Atas (SLTA), kemudian dirubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian dirubah lagi menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU), sekarang kembali lagi menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA). Disisi lain sistem pembelajaranpun juga dirubah-ubah dari kurikulum 84 tentang CBSA sebagai kurikulum suplemen dirubah ke Kurikulum Berbasis Kopetensi (KBK), baru dua tahun tahun KBK berjalan, sudah diganti lagi dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ini memberikan kesan pada masyarakat bahwa pemerintah belum sungguh-sungguh memperhatikan pendidikan, sebab pemerintah telah membuat langkah-langkan yang terkesan "asal-asalan". Dibuat sistem yang belum dilaksanakan secara utuh ke sistem baru yang belum tentu lebih baik. Pendidikan di Indonesia pada masa pancaroba ini ternyata mendapat tanggapan yang serius dari masyarakat pemerhati pendidikan.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mencari formulasi terbaik untuk pembenahan sistem pendidikan di Indonesia yang tertinggal dari negara-negara lain. Pemerintah menyadari bahwa sistem pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini masih membutuhkan perbaikan-perbaikan. Usaha perbaikan itu telah

ditunjukkan oleh Mendiknas dengan turun kelapangan guna mencari data tentang problem pendidikan di Indonesia. Tanggal 24 April 2007, Menteri Pendidikan Nasional terbang ke Bandung, 26 April 2007 ke Nusa Tenggara Timur, dilanjutkan ke Bali, Goron Talo dan Sulawesi. (data Majalah Sahabat Pena terbitan Bulan Mei 2006). Sebelum ke daerah tersebut diatas, Menteri telah menjalin kerjasama dengan Kabupaten Kota Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah. Kegiatan menggandeng Kabupaten kota tersebut dilaporkan pada puncak peringatan Hari Pendidikan tanggal 2 Mei 2006. Mendiknas menerapkan pola *Burden Sharing* (berbagi Beban) untuk masing-masing daerah. Demikianlah sebagian kecil dari usaha Mendiknas untuk membuat perubahan sistem pendidikan Indonesia kearah yang lebih sempurna.

Sejak Juli 1997, penderitaan ekonomi bangsa semakin memburuk, persoalan tersebut telah memberikan dampak yang sangat terasa baik dibidang politik, sosial juga sektor pendidikan. Situasi di sekolah-sekolah membutuhkan perhatian yang besar untuk tetap menjaga eksistensinya pada masyarakat juga menghindari siswa *drop out* serta berbagai dampak lain yang lebih buruk lagi bagi sistem pendidikan.

Ada tiga resiko besar bidang pendidikan yang dapat dirasakan masyarakat saat ini :

1. Sebagian masyarakat miskin menolak untuk memasukan anak mereka pada periode penerimaan siswa baru dengan alasan pembiayaan.
2. Kekurangan dana bagi setiap sekolah dapat menghancurkan kualitas pendidikan baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama juga tingkat lanjutan.
3. Menurunnya kualitas sumber daya manusia yang saat ini telah menurun.

Indonesia saat ini berada jauh dibelakang negara-negara tetangganya dalam hal kualitas pencapaian pendidikan. Berikut data pencapaian membaca (test pencapaian membaca pada siswa kelas empat sekolah dasar di Asia Timur).

Negara	Nilai rata-rata (%)
Indonesia	51, 7
Fhilipina	52, 6
Thailan	65, 1
Singapura	74, 0
Hongkong	75, 5

Sumber : Laporan Bank dunia *Education In Indonesia : Prom Crises to Recovery* (1998). (Hafid Abbas, 2003 ; 7).

Data diatas menunjukkan bahwa pendidikan di Indonseia saat sekarang membutuhkan perhatian khusus guna meningkatkan kualitas pendidikan dinegara seribu pulau ini. pengembangan dan perluasan pendidikan pada tiap

sekolah seolah menjadi sulit untuk bergerak karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBN lebih banyak tersedot oleh pendapatan guru, renovasi sekolah-sekolah, dan lebih banyak pada operasional sehari-hari bukan untuk pengembangan. (Khoe Yao Tung, 2001 ; 19).

Pada tahun 1999, suatu survey keterampilan matematik dan sains internasional untuk pelajar kelas delapan. *The Third International Mathematics and Science Study-Report (TIMSS-R)* melaporkan bahwa keterampilan siswa Indonesia berada pada tingkat 34 untuk bidang matematik, ke 32 untuk bidang Ilmu Pengetahuan Alam, dari 38 negara yang ikut serta. Singapura, Korea, Taiwan, Hongkong dan Jepang menguasai lima besar matematika, begitu juga dengan sains urutannya adalah Taiwan, Singapura, Jepang dan Korea, disisipi oleh Hongaria pada peringkat tiga. Kalaupun ada anak Indonesia yang menjadi juara olimpiade fisika, itu karena mereka diberi pendidikan dengan pengalokasian waktu, serta pembinaan khusus. Pembinaan kurikulum yang dilakukan oleh Depdiknas terhadap ilmu-ilmu dasar matematika dan sains, dari tahun ketahun tidak menampakan peningkatan kopetensi yang berarti, namun sebaliknya yaitu merampingkan dan meringankan materi pembelajaran matematika dan sains. Padahal penelitian dilapangan telah memberitahukan bahwa sekolah-sekolah unggul dengan pengalokasian waktu dan pembinaan khusus telah memberikan hasil membanggakan untuk peningkatan mutu belajar siswa seperti menjuarai olimpiade. Sekolah-sekolah unggul sangat selektif dalam kualifikasi guru sains serta masih menggunakan teori matematika klasik seperti aljabar, analit, trigonometri, ilmu ukur ruang serta ilmu matematika moderen. Pengalokasian waktu belajarpun jauh lebih banyak dari waktu yang ditetapkan oleh kurikulum Nasional. (Khoe Yau Tung, 2001 ; 40)

Persoalan lain adalah pemerintah membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menggarap standar pendidikan Indonesia. Ada delapan bentuk standar pendidikan yang digarap oleh BSNP.

1. Standar Isi.

Merupakan materi dari tingkat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik didalam berjenis tingkat dan jenis pendidikan.

2. Standar Proses.

Meliputi pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan

3. Standar Kompetensi Lulusan.

Merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tentang kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru serta tenaga kependidikan lainnya.

5. Standar Sarana dan Prasarana.

Mengenai kriteria minimal tentang runag belajar, perpustakaan, tempat olah raga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi, laboratorium, bengkel kerja dan sumber belajar lainnya termasuk penggunaan teknologi komunikasi serta informasi.

6. Standar Pengelolaan.

Meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan tingkat nasional.

7. Standar pembiayaan.

Berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi suatu pendidikan selama satu tahun.

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Selain dari tugas tersebut, terdapat tugas lain yang juga lebih berat yaitu :

1) Menyelenggarakan ujian Nasional, 2) Memberikan rekomendasi pada pemerintah pusat maupun daerah dalam menjamin dan pengendalian mutu pendidikan, 3) Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, 4) Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks belajar.

Dalam mengemban tugas yang berat dan mulia itu, apa yang ingin dicapai oleh BSNP (Tilaar, 2006 ; 171) hanyalah merupakan ilusi atau pembohongan pada rakyat. BSNP bukan menghadapi peserta didik sebagai subjek, akan tetapi sebagai objek yang dinilai berdasarkan standar-standar sendiri. Sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengadakan penilaian keberhasilan proses pendidikan adalah guru yang bertugas sehari-hari di depan kelas dan dalam pergaulannya dengan murid. Peserta didik adalah subjek dengan keseluruhan perkembangan kepribadiannya yang hanya dapat dikenal dan dihayati oleh guru. saat ini tugas mulia itu telah diambil alih oleh BSNP dengan menentukan tingkat kelulusan peserta didik.

Selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut, seluruh usaha tercurah untuk mengemban misi yang pada hakikatnya adalah perwujudan pendidikan yang mamapu membangun masyarakat Indonesia cerdas, kompetitif, berkeadilan, bermutu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal juga global. Misi ini disebut oleh Menteri Pendidikan Bambang Sudibya "Pendidikan Bermutu Untuk Semua".

Pendidikan dinegara beribu pulau ini tidaklah semata-mata merupakan tugas Depdiknas, Diknas Propinsi, Kabupaten atau kota saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab legislatif, para orang tua, para pemimpin Agama, pelaku media massa, pemerhati pendidikan, kaum industri dan seluruh komponen bangsa.

Program pembangunan Depdiknas 2005-2009 menjadi titik perhatian untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu relevansi, daya saing, penguatan tata kelola serta akuntabilitas serta pencitraan publik seluruh jajaran pendidikan di pusat maupun di daerah. (Forum Wartawan Peduli Pendidikan, 2006: 24)

B. Pendidikan Sebagai Amanah Konstitusi.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengacu kepada Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang dituangkan pada butir :

- a. Amanah Undang-undang Dasar 1945 agar Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Pendidikan Nasional Tahun 2003 dijelaskan bahwa :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006 : 5)

Amat menarik bila dicermati tulisan dari para wartawan dalam sebuah buku yang berjudul "Kilas Balik Pendidikan Nasional 2006" bahwa fokus pendidikan di Indonesia saat ini adalah membangun sumberdaya manusia (SDM), dengan demikian maka pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi bangsa dan negara untuk dapat bertahan ditengah persaingan global. Setelah mempertimbangkan *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan maka Departemen Pendidikan membuat visi pembangunan yang bertema "Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025" Depdiknas pun akhirnya membuat Rencana strategis pendidikan.

Pada bulan April tahun 2006 di Sawangan, diadakanlah *Rembuk Nasional* untuk menguatkan sosialisasi renstra tersebut. Peserta Rembuk Nasinal ketika itu adalah, para pejabat di Depdiknas, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, ketua DPRD propinsi, Diknas Propinsi juga sejumlah Gubernur dan Bupati ikut hadir dalam pertemuan itu. Renstra Depdiknas itu disempurnakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Karornas) "Revitalisasi Pendidikan" awal Agustus tahun 2006 yang juga mengikutsertakan para pakar, praktisi, birokrasi pendidikan juga DPR maupun pemerhati pendidikan nasional. Renstra Depdiknas merupakan batu loncatan *stepping stone* untuk peningkatan kapasitas dan modernisasi ke depan sampai 2025. periode pembangunan 2010-2015 menekankan Penguatan Pelayanan, pada 2015-2020 menekankan Daya Saing Regional sedangkan 2020-2025 menekankan Daya Saing Internasional.

C. Persoalan guru.

Pada tanggal 25 November para guru se Indonesai memperingati hari guru Nasional. Suatu fenomena tentang kehidupan guru yang cukup mengejutkan adalah, adanya aksi unjuk rasa oleh para guru menuntut pembayaran rapel kenaikan gaji. Kemudian berbagai komentarpun bermunculan untuk mendukung, menentang bahkan ada yang sisnis. Memang kurang tepat bila guru mengadakan aksi demo, sebab tidak sesuai dengan tuntutan jati diri guru sebagai sumber nilai-nilai normatif. Dengan tuntutan tentang rapel dan tunjangan gaji melalui demo, seolah-olah para guru itu bersifat materialistis, guru sudah menjauh dari nilai-nilai idelisme guru sebagai sumber ketauladanan. Namun dari sisi lain, apa yang dilakukan oleh guru-guru tersebut dapat dikatakan sebagi suatu kewajaran. Kejadian yang dilakukan oleh para guru tersebut sebetulnya sebagian kecil dari permasalahan besar yang ada disekitar guru. Kalau mau melihatnya dalam cakrawala yang cukup luas serta daya nalar jernih, empati disertai sikap yang arif, maka aksi demo guru itu merupakan suatu mekanisme dinamika perilaku para guru sebagai manusia biasa.

Dari segi keadilan dan kesejahteraan dalam arti imbal jasa, rasa aman, kondisi kerja serta kepastian karir, para guru masih berada dalam kesenjangan. Ada beberapa kesenjangan yang dirasakan oleh guru sebagai perlakuan diskriminatif, *pertama*, kesenjangan antara guru dengan birokrat yang

memperoleh tunjangan struktural yang saat ini naik melangit disertai fasilitas lainnya. *Kedua*, kesenjangan antara guru dan dosen. Ketika dosen telah lama menerima tunjangan fungsional, guru hanya mendapat tunjangan tenaga pendidikan. Kesenjangan itu bukan hanya berkisar masalah nominalnya, Para guru mengakui bahwa dosen patut mendapat imbalan yang lebih besar karena beban dan tanggung jawabnya lebih besar pula, akan tetapi ada rasa diskriminatif seolah-olah dosen itu berada pada kasta yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan seorang guru. *ketiga*, kesenjangan antara guru yang digaji oleh pemerintah dengan guru yang digaji oleh swasta. Kesenjangan itu juga nampak dalam perlakuan terhadap guru yang berbeda tersebut. *Keempat*, kesenjangan antara guru pegawai tetap dengan guru pegawai tidak tetap yaitu honorer dalam hal keseimbangan tuntutan kerja. *Kelima*, kesenjangan antara guru-guru yang mengajar dikota dengan guru-guru yang mengajar dipedesaan, terutama desa terpencil, menyangkut masalah penadapatan, kesempatan melanjutkan studi, kesempatan mengikuti perkembangan dan tugas yang lebih berat (Muhammad Surya, 2004 ; 3).

Jabatan guru selalu dikaitkan dengan rujukan-rujukan nilai yang bersifat normatif, sehingga selalu dipandang sebagai suatu jabatan mulia. Guru dipandang sebagai sumber ketauladanan serta dituntut untuk berperilaku ideal secara normatif, maka timbullah jargon-jargon pujian seperti "digugu dan ditiru", "pahlawan tanpa tanda jasa", "pejabat mulia" dan lain-lain. Masyarakat menuntut agar guru berperilaku sesuai dengan norma-norma itu, dan masyarakat tidak mau tahu dengan persoalan apa yang menjadi hambatan bagi guru untuk menerapkan perilaku tersebut.

Guru dengan segala kesadarannya berusaha untuk meningkatkan kinerja guna memenuhi tuntutan yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun guru masih tetap dan terus dituntut tanpa keberpihakan untuk memperhatikan realitasnya sebagai manusia. Keadaan inilah yang membuat guru tersandung. Dalam suasana reformasi saat ini, guru mencoba keluar dari belenggu-belenggu sanjungan yang justru membuat mereka terpasung. Guru sebagai manusia biasa, dengan harga dirinya mencoba bangkit untuk menuntut hak dan membela martabatnya dalam berbagai bentuk aksi. Semua pihak menjadi terkejut dengan aksi tersebut, maka berbagai macam reaksi pun bermuculan. Para pejabat memberikan reaksinya terhadap aksi para guru. di antara reaksi tersebut dilontarkanlah kalimat "guru bukan buruh tapi adalah pendidik, bila guru mogok berarti melanggar disiplin".

D. Dukungan Pemerintah.

Undang-undang Dasar kita mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ujung tombak pelaksanaan undang-undang tersebut terletak di daerah. Seperti juga Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2003, bahwa pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke

daerah. Pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas untuk semua orang merupakan perwujudan dari deklarasi manusia PBB tahun 1948, kemudian diperkuat oleh keputusan Konferensi UNESCO di Yom Tien Thailand tahun 1990 dan konferensi Dakkar.

Untuk melaksanakan pendidikan dasar untuk semua, tentu diperlukan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana dalam Deklarasi PBB tentang hak atas pembangunan yang diadopsi oleh Sidang Umum bulan Desember 1996. kewajiban negara, dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan wajib belajar diperlukan hal-hal sebagai berikut : 1) Tersedianya sarana seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belajar lainnya, 2) Keterjangkauan sarana pelaksanaan wajib belajar, 3) Penerimaan, yaitu diterima tidaknya bentuk lembaga pendidikan oleh rakyat, 4) Kesesuaian, yaitu kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungannya.

Tuntutan pelaksanaan wajib belajar untuk semua di daerah merupakan wewenang pemerintah daerah. Untuk melaksanakan hal tersebut tentunya pemerintah perlu menyediakan dana yang cukup sebagaimana diminta oleh UUD 1945. Tentunya tugas pemerintah pusat adalah membantu hal-hal yang merupakan tanggung jawabnya seperti kurikulum yang menjamin kesatuan bangsa, penilaian tenaga guru yang profesional. Sedangkan untuk pusat-pusat pendidikan tenaga guru profesional tentunya dapat dilaksanakan oleh daerah. (Tilaar, 2006 ; 167)

Kaitan antara wajib belajar dengan kemiskinan, meminta susunan prioritas pembangunan di daerah harus berubah. Hal ini perlu penekanan karena masih ada daerah yang memberikan prioritas utamanya pada pambangunan gedung-gedung atau pambangunan sarana olah raga daripada melaksanakan wajib belajar dan penuntasan kemiskina rakyat. Pendidikan Nasional (Soedijarto, 2002 ; 140) tidak dapat dukungan untuk melaksanakan fungsi konstitusionalnya yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan Nasional, baik dukungan infrastruktur, sarana/prasarana dan fasilitas maupun tenaga kependidikan. Yang jadi persoalan intinya adalah dana bukan karena masalah undang-undangnya.

E. Persoalan Pendidikan Sekolah Dasar.

Sampai akhir tahu 1960-an dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan masih sangat tinggi, mereka memberikan sumbangan nyata baik tenaga, fikiran, maupun dana dalam membangun sekolah baru atau merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Tetapi begitu digulirkan proyek SD Inpres pada awal tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1980-an yang menggunakan pola kontraktual, dilakukan secara massal, dan sarat dengan kebocoran-kebocoran, maka partisipasi masyarakat lansung anjlok, mereka hanya menjadi penonton, apalagi hal itu diperkuat dengan sistem politik Orde Baru yang cenderung tertutup serta sentralistik.

Ketika Orde Baru berganti dengan orde reformasi, pemerintah nampak kerepotan membangkitkan kembali partisipasi masyarakat yang telah terlanjur membeku. Berbagai terobosanpun ditempuh misalnya dengan membentuk komite sekolah, dewan pendidikan, serta dilakukannya manajemen berbasis sekolah. Media-media tersebut adalah usaha perangkulan kembali partisipasi masyarakat agar kembali berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan berikut adalah tidak sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dengan daerah dalam dualisme kewenangan untuk pembangunan pendidikan. Orang daerah (kata Mujito dalam Pena Pendidikan, 2006 ; 10) yang dulu ditugaskan di Dinas Pendidikan, hampir tidak pernah memikirkan persoalan teknis edukatif, mereka hanya memikirkan persoalan fisik, tidak jarang mereka menilai pendidikan sebagai proyek. Persoalan ketidak acuan itu berkelanjutan sampai saat ini, orang-orang daerah melimpahkan permasalahan pendidikan pada pemerintah pusat, sementara untuk masalah pengelolaan sumber daya alam cenderung mengabaikan pemerintah pusat.

Ketika pemerintah pusat mencoba mencari solusi untuk perbaikan pendidikan dengan mengalirkan bantuan kesekolah yang dikenal dengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dikelola langsung oleh daerah, ternyata Bank Pembangunan Asia (ADP) melaporkan bahwa bantuan itu berkurang sekitar 10%-70% kesekolah. Bahkan di Propinsi NTT ada sebagian sekolah yang tidak menerima sama sekali. Akhirnya Menteri Pendidikan harus membuat langkah-langkah perbaikan dengan cara membentuk program *Burden Sharing* (berbagi beban) agar pemerintah daerah meningkatkan komitmennya terhadap pendidikan.

Guru adalah tauladan bagi murid, kapada gurulah murid mengadukan persoalan pendidikannya. Dengan interaksi setiap hari antara murid dengan guru secara baik, maka guru akan mampu mentransfer budaya edukasi kepada setiap murid. Untuk menciptakan suasana edukasi itu dibutuhkan tenaga, fikiran dan waktu bagi guru guna memformulasi bentuk agar murid menjadi manusia yang cerdas dan berbudaya. Persoalannya saat ini adalah, masih ada guru yang belum sanggup mengoptimalkan tenaga, fikiran dan waktunya untuk mendidik anak. Masih ada guru yang harus membagi waktunya antara mencurahkan perhatiannya kepada murid dan perhatian untuk mensejahterakan keluarga. Masih ada sekolah yang kekurangan guru, kekurangan buku-buku wajib dan penunjang. Mungkin masih ada kekurangan-kekurang lain yang belum terdeteksi oleh kita.

F. Rekomendasi Pendidikan sebuah Tawaran

Menyimak banyaknya persoalan pendidikan yang tengah dihadapi oleh negara seribu pulau ini, maka ada beberapa tawaran-tawaran sebagai injeksi penawar untuk sebuah penyakit menahun bidang pendidikan. Usaha pengobatan itu bukan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah saja, akan tetapi juga tanggung jawab bagi segenap masyarakat Indonesia. Upaya

pemerintah melalui Mendiknas membuat *Burden Sharaing* ternyata telah membuahkan hasil yaitu terkendalinya dana BOS untuk sekolah-sekolah secara baik, walaupun ada sebagian kecil sekolah-sekolah yang masih nakal untuk menyelewengkan dana tersebut.

Ada beberapa tawaran sebagai rekomendasi untuk perbaikan pendidikan di Indonesia saat ini (Jacques Delors, 2002 ; 223)

1. pemerintah harus menyingkirkan para birokrat yang koruptor. Caranya adalah dengan mencopot setiap jabatan mulai dari kasubag, kabag sampai pada jajaran tertinggi, diganti dengan pejabat baru yang tidak korupsi.
2. Pemerintah harus menciptakan guru-guru dan pekerja-pekerja pendidikan lainnya agar berkualitas dengan mempertimbangkan rekrutmen, preservis dan in servis trainingnya, sehingga akan menjadikan guru di Indenisa ini berkualitas.
3. Pemerintah harus memperhatikan perbaikan status para guru dengan mempermudah kepengkatannya dan memperhatikan kesejahteraan guru.
4. Pemerintah harus membuat kurikulum yang memperhatikan segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik agama, dan keutuhan berbangsa bukan kurikulum yang diseragamkan sehingga mematikan kreatifitas anak didik.
5. Pemerintah harus menyediakan anggaran biaya yang cukup untuk membenahan sarana dan prsarana penunjang kemajuan pendidikan seperti pustaka, laboratorium serta sarana kretifitas lainnya, sekaligus memonitor setiap penggunaan dana tersebut secara baik

Pondamen penuntasan masalah pendidikan di Indonesi ini hendaknya juga mengikut sertakan lingkungan. Dengan memfungsikan lingkungan sebagai mitra pendidikan, maka diharapkan pendidikan di Indonesia akan menjadi milik semua lapisan seperti era tahun 60-an. Sebuah tawaran menarik dari Adi Guru Prof. Dr. Imam Chourmain, M.Ed bahwa di Indonesia saat ini dibutuhkan manajemen berbasis lingkungan. Disamping itu pendidikan di Indonesia juga membutuhkan perubahan paradigma baru dari humanis menjadi realis-etis. Dengan demikian akan terciptalah masyarakat yang tidak hanya mengausai ilmu belaka, akan tetapi juga mempunyai roh ke Indnesiaan yang utuh. *Wauallahu a'lam bi sawwab...*

DAFTAR BACAAN

- H.A.R. Tilaar. 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Hafid Abbas. 2003, *Community-Based Education, A Roadmap of Indonesian Education From Crises to Recovery*. Mizan Media Utama. Bandung
- Jaap Scheeren. 2003. *Peningkatan Mutu Sekolah*. Logos. Jakarta.

- Jacques Delors. 1998, *Pendidikan Untuk Abad XXI : Pokok Persoalan dan Harapan*. UNESCO Publishing.
- Khoe Yao Tung. 2001, *Simphony Sedih Pendidikan Nasional, Refleksi Dunia Pendidikan Nasional, Kumpulan Artikel Tentang Ulasan Kritis Tentang Kepedihan, Kegetiran dan Keprihatinan Atas Krisis Pendidikan Kita*. Abdi Tandur. Jakarta.
- Muhammad Surya. 2004, *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Majalah. 2006, *Pena Pendidikan*. Nomor : 01/Tahun I/Mei 2006.
- Soedijarto, *Pendidikan Nasional Sebagai Proses Transpormasi Budaya, Pendidikan yang Relevan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional*. Balai Pustaka. Jakarta
- Soepartinah Paksi. 1981, *Anak dan Perkembangannya, Pendekatan Psyc-Pedagogis Terhadap Generasi Muda*. PT. Gramedia. Jakarta
- Stanley. J. Grenz, (Trj.Wilson Suwanto) 2001, *Keutamaan dalam Postmodernisme*. Andy Offset. Yogyakarta.
- Tim Penulis Rosda. 1995, *Kamus Filsafat*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung